

# **DISKURSUS PENDIDIKAN KRITIS (*CRITICAL PEDAGOGY*) DALAM KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Ari Setiarsih  
Universitas Negeri Yogyakarta  
*Email : arisetiarsih@gmail.com*

Naskah diterima: 15/06/2017 revisi: 15/09/2017 disetujui: 20/09/2017

## **Abstrak**

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam menyiapkan warga negara muda untuk menghadapi perubahan zaman. Pembelajaran PKn perlu dikonstruksi secara humanis, dialogis, kritis, dan mengedepankan budi pekerti untuk membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam kehidupan masyarakat demokratis. Berdasarkan ulasan tersebut, artikel ini bertujuan untuk memaparkan secara komprehensif diskursus pendidikan kritis (*critical pedagogy*) dalam kajian PKn untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Penulisan artikel menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan identifikasi wacana. Sementara teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi. Hasil dari pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa PKn berdasarkan teori kritis dapat dikonstruksi melalui 3 model rasionalitas yaitu rasionalitas teknis, rasionalitas hermeunetik dan rasionalitas emansipatori yang menekankan metode dialogis dan peran guru sebagai pendidik transformatif. Dengan demikian peserta didik dapat berperan sebagai subjek pendidikan yang memiliki otonomi, kebebasan, dan kemampuan berpikir kritis untuk menjadi warga negara transformatif.

**Kata kunci:** *Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kritis.*

## ***THE DISCURSES OF CRITICAL PEDAGOGY IN THE CIVIC EDUCATION***

### ***Abstract***

*Civic education have an important position to prepare young people for their roles and responsibilities as good citizens. Civic education needs to be humanist, dialogical, critical, and put forward character building to build the critical thinking ability of students in the life of democratic society. Based on these reviews, this article aims to describe comprehensively the critical pedagogy discourse in the study of Civics to realize students who have the ability to think critically. The article is written by descriptive qualitative research method with literature study approach. The source of data is come from the books, journals, and other scientific articles which collected by documentation techniques and discourse identification. While the data analysis techniques using content analysis techniques. The result of this discussion shows that Civics based on critical theory can be constructed through 3 rationality models namely technical rationality, hermeunetic rationality and emancipatory rationality that emphasizes the dialogical method and the role of teachers as transformative educators. So the students can be educational subjects with autonomy, freedom and critical thinking skills to become transformative citizens.*

**Keywords:** *Civic Education, Critical Pedagogy.*

## PENDAHULUAN

Seiring mengalirnya arus modernisasi, sistem pendidikan saat ini tak ubahnya dengan sistem kapitalis. Nuryatno (2011: 89) menyatakan bahwa dunia pendidikan tengah dihadapkan pada persoalan serius yaitu semakin dominannya *corporate values* dimana nilai korporasi telah menjadi *core values* mengalahkan *academic values*. Jika kondisi seperti ini diteruskan maka dunia pendidikan disangsikan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kehidupan publik, politik dan kultural karena pendidikan justru dibentuk oleh dunia pasar. Hal yang tak kalah penting adalah pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi diberbagai bidang kehidupan manusia. Sebagaimana penjelasan Susanto (Hidayati, 2008: 64) bahwa perkembangan pengetahuan dan teknologi berdampak besar terhadap perubahan masyarakat seperti pergeseran budaya, nilai, dan agama yang digantikan dengan nilai-nilai yang tidak selalu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan nilai.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa saat ini kehidupan manusia begitu kompleks. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa pada abad 21 manusia menghadapi beberapa tantangan global seperti perubahan cepat masyarakat dalam melintasi batas-batas nasional, pengakuan yang berkembang dari hak-hak masyarakat adat dan kelompok minoritas, runtuhnya struktur politik dan kelahiran yang baru, perubahan peran perempuan dalam masyarakat, dampak ekonomi global dan perubahan pola kerja, dampak teknologi informasi komunikasi, peningkatan populasi global, dan penciptaan bentuk-bentuk baru dari masyarakat (Kerr, 1999: 9).

Guna menghadapi tantangan tersebut, hasil studi Kerr (1999: 2) di 16 negara menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai topik penting, pendekatan abad baru, dan mendesak bagi banyak negara untuk mempersiapkan warga negara

muda agar mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya melalui peran pendidikan. Hal ini tak lain adalah untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian hidup dalam dunia yang cepat berubah.

Pada realitanya PKn mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pergeseran sosial dan politik kenegaraan di beberapa negara mendesak munculnya berbagai studi tentang penelitian perkembangan PKn secara komprehensif. Disamping itu, muatan PKn yang rentan terhadap indoktrinasi politik maupun kebijakan rezim yang berkuasa juga menjadi salah satu determinan penting dalam revitalisasi PKn. Sebagaimana pendapat Giroux (1980: 331) bahwa jika ingin menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui revitalisasi PKn maka esensi PKn harus terbebas dari beban intelektual dan sejarah ideologi agar dapat dikembangkan rasionalitas baru untuk meneliti hubungan sekolah dan masyarakat yang lebih luas.

Pada konteks inilah penting kiranya menelaah diskursus pendidikan kritis dan rasionalitas dalam kajian PKn untuk mewujudkan peserta didik yang kritis dan demokratis dalam merespon perkembangan dan tuntutan zaman. Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana peran pendidik dalam mewujudkan kebijakan PKn yang berorientasi pada konsepsi kewarganegaraan multidimensional sebagai konsepsi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan manusia pada abad ke-21 (Cogan, 1998:11)

Ulasan di atas sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat diperoleh hasil kajian yang komprehensif tentang diskursus pendidikan kritis (*critical pedagogy*) dalam kajian PKn untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, pada pembahasan artikel ini penulis memfokuskan kajian pada PKn kritis dengan beberapa topik bahasan diantaranya: Bagaimana konsep pendidikan kritis (*critical pedagogy*)? Bagaimana konsep

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)? Bagaimana diskursus pendidikan kritis (*critical pedagogy*) dalam kajian PKn?

#### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Data bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, identifikasi wacana dari buku, jurnal, makalah, artikel online, majalah, surat kabar, dan sumber bacaan lain yang relevan dan berhubungan dengan diskursus pendidikan kritis (*critical pedagogy*) dalam kajian PKn. Sementara teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi dengan mengorganisasikan dan mengkategorikan data untuk menemukan hasil penelitian yang akan menjadi kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Konsep pendidikan kritis (*critical pedagogy*)**

Pendidikan kritis (*critical pedagogy*) adalah aliran pendidikan yang meyakini bahwa dalam semua aktivitas pendidikan terkandung adanya muatan politik (Nuryatno, 2011: 1). Pendidikan kritis mencakup teori pendidikan dan praktek pembelajaran yang bertujuan untuk membangun kesadaran kritis peserta didik pada kondisi sosial yang menindas (Hidayat, 2013: 6). Hal ini selaras dengan pendapat Giroux yang menyebut pendidikan kritis sebagai pendidikan radikal yang konsen pada prinsip demokrasi dan kebebasan dari penindasan dalam praktik pendidikan (Hidayat, 2013: 11). Giroux ingin membangun sebuah kemungkinan munculnya kesadaran yang tidak mungkin berlangsung dalam kelas sehingga pendidikan kritis berupaya menciptakan pendidikan yang optimis dalam membangun masyarakat demokratis (Hidayat, 2013: 75-76). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kritis (*critical pedagogy*) adalah aliran pendidikan yang menekankan

pada kesadaran berpikir kritis untuk menciptakan pendidikan yang optimis dan demokratis.

Nuryatno (2011: 10) menyatakan terdapat beberapa asumsi tentang filsafat dasar pendidikan kritis antara lain sebagai berikut.

1. Manusia diyakini memiliki kapasitas untuk berubah dan berkembang karena memiliki potensi untuk belajar dan dibekali dengan kapasitas berpikir dan *self-reflection*.
2. Manusia memiliki panggilan ontologis dan historis untuk menjadi manusia yang lebih sempurna.
3. Manusia dalam bahasa Colin Lankshear adalah makhluk praksis yang hidup secara otentik hanya saat terlibat dalam transformasi dunia.

Dari asumsi di atas maka pendidikan kritis dapat dipahami dalam dua makna. *Pertama*, pendidikan kritis sebagai paradigma berpikir yang dibangun atas dasar *critical thinking* untuk mengkritisi pendidikan dari segi filosofis, teori sistem, kebijakan atau implementasi (aspek kognitif). Hal ini dikarenakan institusi pendidikan memiliki sifat tidak netral dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, kultural, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu membangun terbentuknya kesadaran kritis atau *critical thinking* atau *consciousness* yaitu pemikiran yang didasarkan atas kesadaran untuk menyingkap fenomena atau asumsi tersembunyi yang hanya berdasarkan "*common sense*" (Nuryatno, 2011: 2-3). Dengan kata lain dalam paradigma ini pendidikan berfungsi untuk melatih peserta didik agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam suatu sistem dan struktur kemudian mampu menganalisisnya dan menrasformasikannya (Rozi, 2014: 36).

*Kedua*, pendidikan kritis sebagai gerakan sosial yaitu pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang egaliter, humanis,

demokratis berdasarkan kesadaran kritis peserta didik. Hal ini berkenaan dengan aspek praksis yang berarti kesadaran kritis tidak hanya pada aspek kognitif berupa pengetahuan, namun juga dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Oleh karena itu, pengetahuan menjadi pintu masuk untuk mengubah dunia menjadi lebih humanis dan adil (Hidayat, 2013: 7-9).

Pada konteks persekolahan, pendidikan kritis dapat dipahami sebagai sebuah proses dialektis yang mendukung proses dialog antara peserta didik dan guru (McLaren, 2002: 32). Hal ini didasarkan pada realitas bahwa pendidikan di dalam ruang kelas sarat dengan hegemoni dan dominasi guru. Peserta didik beraktivitas sebagai penerima ilmu dengan mendengar, mencatat, menulis dan menghafal sehingga tidak tercipta proses dialogis dan berpikir kritis untuk saling mengkritisi. Dalam bahasa Freire model pendidikan yang demikian disebut sebagai pendidikan “gaya bank”. Oleh karena itu, Freire menggagas sistem pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan dimana guru dan peserta didik berperan sebagai subjek yang memiliki kesetaraan untuk membangun dialog dan pengalaman keseharian untuk menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus menciptakan pengetahuan yang dibangun dalam ruang kelas (Hidayat, 2013: 10).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal penting. *Pertama*, secara ontologis pendidikan kritis dapat ditinjau dari dua objek yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah pendidikan yang demokratis dan objek formal atau cara pandang yang digunakan adalah proses pendidikan yang dialogis. *Kedua*, secara epistemologis sumber pengetahuan pendidikan kritis dapat diperoleh melalui metode ilmiah. *Ketiga*, secara aksiologis pendidikan kritis merupakan aliran pendidikan yang bertujuan mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang egaliter, humanis, dan demokratis berdasarkan kesadaran kritis peserta didik.

### **Konsep Pendidikan Kewarganegaraan**

Secara ontologis definisi Pendidikan Kewarganegaraan (selanjutnya disingkat PKn) dapat ditinjau dari beberapa pendapat ahli. Cogan (1998: 13) mendefinisikan warga negara atau *citizen* sebagai anggota pokok dari suatu kelompok masyarakat. Kewarganegaraan atau *citizenship* sebagai seperangkat karakteristik untuk membentuk warga negara. Sementara PKn atau *citizenship education* didefinisikan sebagai kontribusi pendidikan untuk mengembangkan karakteristik-karakteristik warga negara. Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa PKn merupakan suatu upaya untuk membentuk warga negara yang memiliki karakteristik-karakteristik kewarganegaraan melalui bidang pendidikan.

Tidak jauh berbeda dengan Cogan, Kerr (1999: 6) mengartikan *citizenship or civics education* sebagai proses penyiapan warga negara muda untuk memiliki peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini selaras dengan konsep PKn di Indonesia yang diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus utama dalam pembentukan karakteristik, peran dan tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Merujuk pada kesimpulan di atas dapat disederhanakan bahwa salah satu tujuan PKn adalah membentuk warga negara yang baik. Selanjutnya tujuan PKn dijabarkan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan yang meliputi sikap

kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*), pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*) (Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTS).

Dari dimensi kewarganegaraan di atas, pembelajaran PKn bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

Menyimak tujuan di atas, tampak jelas pada poin pertama bahwa salah satu tujuan PKn adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan salah satu kompetensi abad 21 yang harus dimiliki peserta didik yaitu keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi kemampuan berpikir kritis dan mengatasi masalah, kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi, dan kemampuan menciptakan

kreativitas dan berinovasi (Triling dan Fadel, 2009: 49).

Guna merealisasikan tujuan tersebut maka PKn memiliki tiga fungsi pokok yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina warga negara agar memiliki sikap tanggung jawab (*civic responsibility*) dan mendorong warga negara untuk berperan serta dengan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan (*civic participation*). Fungsi tersebut sejalan dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) (Winarno, 2013: 19). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan pendidikan disiplin ilmu yang bertujuan mewujudkan warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang baik.

#### **Diskursus pendidikan kritis (*critical pedagogy*) dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan**

Cheng (Winataputra dan Budimansyah, 2012: 4) menyatakan bahwa perkembangan kehidupan saat ini menuntut adanya upaya pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn yang berorientasi pada konsep "*contextualized multiple intelligence*" dalam nuansa lokal, nasional, dan global. Cogan (1998:11) selaras dengan Cheng merekomendasikan bahwa kebijakan pendidikan PKn di masa depan harus berdasarkan suatu konsepsi kewarganegaraan multidimensional sebagai konsepsi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan umat pada abad ke-21. Kebijakan tersebut harus mencakup "*.....all aspects of education, including curriculum and pedagogy, governance and organization, and school community relationships*". Dengan kata lain, seluruh aspek pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran,

pemerintah, organisasi pendidikan, dan komunitas sekolah harus berorientasi pada pengembangan konsep kewarganegaraan multidimensional.

Pernyataan di atas selanjutnya menegaskan bahwa pada abad 21 terminologi PKn harus dimaknai dalam konsep yang luas. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa pada abad 21 manusia menghadapi berbagai tantangan dan kehidupan yang cukup kompleks sehingga PKn memiliki posisi sebagai bagian dari kurikulum persekolahan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam merespon tantangan global yang mengarah pada ciri kontinum PKn pada titik maksimal yaitu *thick, inclusive, activist, citizenship education, participate, process led, value based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice* (McLaughlin dalam Kerr, 1999: 11).

Dengan demikian, PKn harus memuat kewarganegaraan multidimensional dimana PKn tidak saja ditempatkan sebagai bidang studi namun juga menjadi program pendidikan yang bersifat komprehensif untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter kritis, kreatif, inovatif dan kompetitif dalam menghadapi perkembangan global. Dengan kata lain kebijakan pendidikan seyogyanya menumbuhkan karakteristik kewarganegaraan multidimensional untuk menghadapi tantangan abad 21 yang menurut Cogan (1998: 116) terdiri dari beberapa karakteristik sebagai berikut.

1. Kemampuan mengenal dan memecahkan masalah sebagai bagian dari masyarakat global.
2. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggungjawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat.
3. Kemampuan memahami, menerima, dan menghormati perbedaan budaya.
4. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis.
5. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan.
6. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan.
7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia.
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkat pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.

Selaras dengan Cogan, Banks (2008: 135) menyatakan bahwa pada abad 21 konsep PKn perlu ditata ulang agar dapat melakukan pendidikan secara efektif pada peserta didik melalui pengetahuan akademik transformatif. Lebih lanjut Banks (2008: 135) menegaskan "*transformative citizenship education helps students to develop the decision making and social action skills that are needed to identify problems in society, acquire knowledge related to their homes and community cultures and languages, identify and clarify their values, and take thoughtful individual or collective civic action. It also fosters critical thinking skills and is inclusive of what DeJaeghere calls critical citizenship education*". Dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa PKn transformatif sangat penting untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dalam konteks nasional dan global yang berguna untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan inklusif peserta didik yang kemudian disebut sebagai PKn kritis.

Berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis menekankan rasionalitas dalam merekonstruksi suatu ilmu adalah hal yang penting. Giroux (1980: 331) mendefinisikan rasionalitas sebagai asumsi spesifik dan praktik sosial yang berfungsi sebagai penghubung individu dan kelompok dalam berhubungan dengan masyarakat luas. Dengan kata lain rasionalitas merupakan kesadaran yang dibangun dari nalar manusia sebagai dasar untuk menyingkap kepentingan dibalik ilmu

pengetahuan yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis seseorang dalam merenungkan dan merekonstruksikan suatu gagasan sehingga sehingga ilmu bersifat objektif.

Merujuk pada pola Habermas yang mengkategorikan pengetahuan dalam tiga kategori yaitu teknis, praktis, dan emansipatoris maka untuk mewujudkan pembelajaran PKn kritis, Giroux (1980: 335-349) mengemukakan konsep rasionalitas dalam tiga kategori yaitu rasionalitas teknis, rasionalitas hermeneutik, dan rasionalitas emansipatori. Penjelasan ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut.

### **Rasionalitas Teknis**

Rasionalitas teknis berhubungan dengan prinsip pengawasan dan kepastian yang menggunakan ilmu-ilmu alam sebagai model pengembangan teoritis. Dengan asumsi ilmu alam maka pengetahuan dimulai dari hal yang konkrit dan dapat diuji secara empiris sehingga pengetahuan menjadi sebuah penelitian ilmiah yang objektif dan bebas nilai. Implikasi model ini terhadap teori pendidikan adalah pengetahuan harus dipisahkan dari proses pembentukannya atau kerangka *law like mode of thought* (Nuryatno, 2011: 53). Oleh karena itu, nilai dan fakta harus dipisahkan agar model inkuiri menjadi objektif. Rasionalitas teknis dalam kajian PKn berupa dua model yaitu sebagai berikut.

### **Model kajian PKn sebagai transmisi kewarganegaraan.**

Model transmisi kewarganegaraan menyatakan bahwa reproduksi pengetahuan berada di dalam realitas sosial dan hubungan dari orang-orang yang menyusunnya. Pada model ini guru dan peserta didik diposisikan sebagai konsumen pasif yang sekedar menerima pengetahuan tanpa mempertanyakan atau menyelidiki substansinya. Dengan demikian, guru berperan sebagai *transmitter* ilmu yang bertugas mengajarkan nilai atau pengetahuan yang diyakininya tentang apa yang perlu diajarkan dan tak perlu diajarkan

kepada peserta didik. Michaelis (Wahab dan Sapriya, 2011: 98) mengatakan bahwa pada model ini PKn seharusnya tidak hanya melakukan transmisi ilmu namun juga turut meneruskan aspek-aspek dasar sejarah dan warisan bangsa.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa model transmisi kewarganegaraan cenderung bersifat statis, konservatif, indoktrinatif dan konvensional. Pada pembelajaran PKn yang mengelaborasi isu kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis maka model transmisi kewarganegaraan menjadi kurang relevan karena akan membatasi kemampuan berpikir dan kreativitas peserta didik. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip pembelajaran "*how to think*" dan tujuan pembelajaran PKN di Indonesia yang menekankan pada kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, berkembang secara positif dan demokratis sesuai karakter masyarakat Indonesia dan berinteraksi dengan bangsa lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

### **Model kajian PKn sebagai ilmu sosial.**

Model kajian PKn sebagai ilmu sosial didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik dapat berpikir kritis, mampu meneliti dan mengamati fenomena sosial sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Melalui kajian PKn sebagai ilmu sosial diharapkan peserta didik memperoleh keterampilan ilmuwan sosial dalam mengumpulkan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraannya (Wahab dan Sapriya, 2011: 92). Oleh karena itu, menurut kajian *National Council for Studies* (Samsuri, 2011: 35) program pembelajaran *Social Studies* seharusnya memasukkan pengalaman-pengalaman yang sarat dengan

cita-cita, asas dan praktik-praktik kewarganegaraan.

Berdasarkan dua model di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PKn merupakan sasaran inti dalam program pendidikan ilmu sosial yang menggunakan pemanfaatan “*content*” untuk mengembangkan kewarganegaraan yang berorientasi pada disiplin ilmu (Wahab dan Sapriya, 2011: 98). Merujuk pada kelebihan dan kekurangan dua model di atas, diharapkan PKn dapat menjadi pendidikan disiplin ilmu yang dapat menciptakan kesadaran kritis peserta didik dalam memecahkan masalah sehingga dapat terwujud peserta didik yang mampu mengambil keputusan dan menunjukkan kemampuan diri dalam praktik kewarganegaraan.

#### **Rasionalitas Hermeneutik**

Rasionalitas hermeneutik tidak menunjukkan produksi pengetahuan yang monologis namun lebih memusatkan perhatian dalam memahami pola interaksi simbolis yang komunikatif. Rasionalitas ini berkaitan dengan penafsiran pembuat teks atau pembaca teks terhadap suatu teks. Oleh karena itu, manusia bukan makhluk pasif yang sekedar menerima informasi namun makhluk aktif yang memiliki hak menafsirkan informasi karena bahasa bukanlah media transparan yang dapat menyampaikan ide-ide tanpa distorsi.

Implikasi rasionalitas hermeneutik dalam pembelajaran PKn adalah membantu pendidik memaknai realitas dibalik teks untuk mengungkap dimensi tersembunyi yang timbul dari muatan pengetahuan dan hubungan di dalam kelas. Pengetahuan tidak disampaikan secara indoktrinasi namun disampaikan secara dialogis yang bertujuan mendorong kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan pengalaman mereka sendiri. Giroux berpendapat bahwa yang mendasari logika kurikulum tersembunyi dan sekolah adalah struktur tersembunyi tentang relasi antara kelas dan budaya (Hidayat, 2013: 87). Dimensi tersembunyi yang tidak

direncanakan, tidak diprogramkan dan tidak tertulis namun turut berpengaruh dalam proses pendidikan itulah yang disebut sebagai kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Kurikulum tersembunyi diartikan segala sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran (Mustaghfiroh, 2014: 150).

Pada pembelajaran PKn peran kurikulum tersembunyi menjadi penting karena kurikulum tersembunyi dapat digunakan untuk memperkuat norma, nilai dan kepercayaan yang telah disampaikan sekaligus menyingkap karakter atau etika di luar disiplin akademik yang bermanfaat dalam meningkatkan kecerdasan afektif peserta didik. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Belinda Charles (Print, 1999: 133-135), bahwa substansi PKn dapat ditata dalam tiga model, yaitu *formal curriculum*, *informal curriculum*, dan *hidden curriculum*. Integrasi ketiga model kurikulum tersebut akan menciptakan proses pembelajaran PKn yang komprehensif dan dapat menembus berbagai mata pelajaran (*cross-curriculum*).

Selain kurikulum tersembunyi lahir pula konsep pendekatan reflektif inkuiri yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi nilai-nilai kemudian mendefinisikan suatu masalah dalam konteks pengalamannya dan atau menghubungkan masalah sosial dengan teks kehidupan sehari-harinya. Jadi, pendekatan reflektif inkuiri menekankan pada pendidikan berbasis pengalaman untuk memunculkan kemampuan peserta didik berpikir aktif dan kritis dalam merefleksikan pengalaman, menyelidiki masalah, dan memecahkan masalah sehingga mampu mengambil keputusan.

Urgensi pendidikan berbasis pengalaman juga didukung oleh gagasan John Dewey yang disebut pendidikan progresif. Pendidikan progresif adalah pendidikan yang dilaksanakan secara

demokratis dimana dalam tataran praktis peserta didik harus berperan aktif dalam proses belajar maupun penyelenggaraan program pendidikan (Rostitawati, 2014: 135). Dalam hal ini maka peserta didik akan belajar melalui kontak langsung dengan objek pembelajaran. Ide dan gagasan dalam konsep pendidikan progresif antara lain: a) memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara perorangan (*individually learning*); b) memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman (*learning experiencing*); c) guru memberi dorongan semangat dan motivasi bukan hanya memerintah; d) guru mengikutsertakan siswa dalam aktivitas kehidupan sekolah; dan e) guru memberi arahan dan bimbingan sepenuhnya pada siswa (Hidayat, 2013: 44-45).

Dalam konteks kajian PKn, pendekatan reflektif inkuiri dapat digunakan sebagai metode untuk memancing kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dengan metode tersebut, peserta didik dapat mengelaborasi, mengolah dan menganalisis permasalahan berdasarkan pengalamannya kemudian belajar bagaimana memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah. Dengan keterampilan tersebut, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang kritis dan mampu memberikan peran diri dalam kehidupan politik.

### **Rasionalitas Emansipatori**

Rasionalitas emansipatori didasarkan pada prinsip, kritik dan tindakan yang bertujuan merefleksikan diri dengan aksi sosial yang telah dirancang. PKn dalam model rasionalitas emansipatori harus menghasilkan dan menekankan pentingnya hubungan sosial. Dengan demikian, proses pembelajaran bertujuan untuk mengkritisi pengetahuan dan mendemistifikasi kepentingan ideologis dibalik konstruksi realitas sosial sehingga pengetahuan emansipatoris dapat mendorong peserta didik menggunakan *self reflection* untuk

mentransformasi dirinya menjadi subjek yang independen dan merdeka (Nuryatno, 2011: 54-55).

Beberapa teori pendidikan radikal pada akhirnya melahirkan apa yang disebut teori reproduksi dan teori transformasi. Madeleine MacDonald (Giroux, 1980: 347) menyatakan bahwa asumsi yang mendasari sebagian besar teori “reproduksi” adalah pendidikan yang berperan memediasi antar kesadaran pada masyarakat. Teori ini mempertahankan bahwa aturan yang mengatur perilaku sosial, moral, dan keyakinan dari tingkat struktur ekonomi makro dan politik diperoleh melalui pengalaman bekerja, proses pendidikan, dan lingkungan keluarga. Setiap orang sadar pada kondisi masyarakat disekitarnya. Pemahaman dan sikap terhadap tatanan sosial adalah kesadaran individu yang diharapkan mampu membawa perubahan.

Guna menciptakan kewarganegaraan transformatif guru harus bertindak sebagai pendidik transformatif yang memandang proses pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh tingkat kompetensi kognitif yang tinggi namun juga bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang mampu menjadi warga negara kritis, aktif dan bertanggungjawab. Pendidik transformatif harus menempatkan pendidikan sebagai *productive force* yaitu media mobilitas sosial bukan *reproductive force*. Selain itu, pendidik transformatif juga harus membantu mengembangkan agensi peserta didik, senantiasa menghadapi teks-teks normatif kurikulum ke dalam realitas sosial dan memandang perlunya konsep pendidikan sebagai *language of critique* dan *language of possibility* dimana pendidikan menjadi media kritis atas realitas sosial dan menawarkan kemungkinan dikembangkannya wilayah publik yang demokratis (Nuryatno, 2011: 87-89).

Sementara itu, Ziser berpandangan bahwa pendidikan harus mampu memadukan secara sinergis semua komponen mulai dari kurikulum,

pembelajaran, proses belajar, penilaian, struktur organisasi, kebijakan, pengembangan profesi dan kenyataan di luar sekolah (Karim, 2009: 171). Oleh karena itu, menurut Mansour Faqih (Karim, 2009: 164) pendekatan yang digunakan bukan pendekatan pedagogi namun pendekatan andragogi yang menempatkan peserta didik sebagai orang dewasa dan memiliki kemampuan aktif merencanakan proses pendidikan sehingga peserta didik tidak lagi berperan sebagai objek pendidikan namun beralih peran sebagai subjek pendidikan. Dengan demikian, PKn kritis diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menjadi warga negara transformatif yang aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, menjunjung tinggi persamaan dan keadilan dalam masyarakat demokratis.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat direduksi konklusi dalam artikel ini bahwa pendidikan kritis merupakan pendidikan yang berupaya menciptakan pendidikan yang kritis dan optimis dalam membangun masyarakat demokratis. Sistem pendidikan bukan lagi pendidikan yang menyeragamkan, mendominasi dan hanya mementingkan aspek kognitif melainkan sistem pendidikan yang humanis, kritis, dan demokratis dengan mengedepankan aspek budi pekerti.

Guna mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis guru harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan kompetensi agar guru tidak berperan sebagai *transmitter* ilmu namun sebagai fasilitator pengembangan ilmu. Proses pembelajaran PKn tidak lagi bersifat sentralistik, pasif dan indoktrinatif namun beralih pada pengembangan ilmu pengetahuan yang positif dan dinamis dimana guru harus berperan sebagai pendidik transformatif.

Berdasarkan konsepsi teori kritis Giroux, diskursus pendidikan kritis (*critical*

*pedagogy*) dalam kajian PKn dapat dilakukan melalui 3 model rasionalitas yaitu rasionalitas teknis, rasionalitas hermeutik dan rasionalitas emansipatori. Pembelajaran PKn perlu dikonstruksi melalui metode dialog komunikatif berdasarkan pengalaman, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Peserta didik tidak lagi berperan sebagai objek pendidikan namun berperan sebagai subjek pendidikan yang memiliki otonomi dan kebebasan. Dengan demikian PKn kritis berupaya untuk menuju terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menjadi warga negara transformatif yang aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat dan menjunjung tinggi persamaan serta keadilan dalam masyarakat demokratis.

### **Saran**

Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu tujuan pembelajaran PKn. Guna mencapai tujuan tersebut PKn harus memuat unsur pendidikan yang humanis, kritis, aktif, dan demokratis. Oleh karena itu, guru perlu merekonstruksi perangkat pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan proses pembelajaran PKn yang komunikatif, komprehensif integratif, aktif, kreatif, dan partisipatif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Banks, J. A. (2008). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in A Global Age. *Educational Researcher*, 37 (3), 129-139.
- Cogan J.J. (1998). *Citizenship Education For The 21st Century: Setting The Context*. Dalam J. J. Cogan & R. Derricott (Eds.), *Citizenship Education for the 21<sup>st</sup> Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.

- Giroux, H A. (1980). *Critical Theory and Rationality in Citizenship Education, Curriculum Inquiry*. Amerika Serikat: Boston University.
- Hidayati. (2008). Pentingnya Pendidikan Nilai di Era Globalisasi. *Dinamika Pendidikan*, 2, Th. XV, 63-75.
- Hidayat, R. (2013). *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, M. (2009). *Pendidikan Kritis Transformatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Paper 4. London: QCA.
- McLaren. (2002). Contesting Capital: Critical Pedagogy and Globalism, A Response to Michael Apple. *Journal Comparative Education*, Columbia University, 1 (2), 27-34.
- Mustaghfiroh, H. (2014). Hidden Curriculum dalam Pembelajaran PAI. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9 (1), 147-162.
- Nuryatno, M. Agus. (2011). *Mazhab Pendidikan Kritis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014, tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Print, M et al. (1999). *Civic Education for Civil Society*. London: Asian Academic Press.
- Rostitawati, T. (2014). Konsep Pendidikan John Dewey. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (2), 133-139.
- Rozi, A. (2014). Pendidikan dalam Perspektif Teori Kritis (Ke Arah Kontekstualisasi Pendidikan Yang Membebaskan). *Jurnal Pelopor Pendidikan*, 5 (1), 31-38.
- Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara: Kritik Pembangunan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Trilling, Bernie and Fadel, Charles. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Fransisco: John Wiley & Sons.
- Wahab, A. A dan Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi Strategi dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, U S. & Dasim B. (2012). *PKn Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.